

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik disertai tuntutan demokratisasi di bidang politik dan pemerintahan, yang muncul sejak berakhirnya masa pemerintahan orde baru, merupakan suatu fenomena budaya yang signifikan di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek akuntabilitas dan transparansi di bidang pengelolaan keuangan negara menjadi masalah penting dalam menjalankan roda pemerintah, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

Akuntabilitas berarti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Indonesia memasuki masa otonomi daerah dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana Kepada Daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menjadi landasan bagi desentralisasi penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi adalah pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, karena dengan otonomi daerah pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan otonomi daerah, anggaran daerah menjadi pintu penting yang paling mungkin setiap daerah mendinamisir kegiatan pembangunan melalui alokasi yang tepat dalam rangka membuat strategi untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sesuai situasi masing-masing daerah.

Desentralisasi ini mengharuskan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan pelimpahan itu dimaksudkan agar pemerintah daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dirinya sendiri sesuai keinginan masyarakat di daerah itu. Wewenang mengatur diri sendiri ini dinamakan otonomi daerah.

Sejak berlakunya otonomi daerah, laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu, yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagai Entitas pelaporan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai

wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan guna dapat membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.

Tujuan PEMDA DKI Jakarta adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat keputusan baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah pemerintah DKI Jakarta yang semakin transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka penulis memandang perlu untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah DKI Jakarta selama ini sehingga dapat menjadi suatu informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah DKI Jakarta mampu dan telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, atau malah sebaliknya

menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan. Melalui rasio derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan PEMDA DKI Jakarta.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian serta pembahasan di muka, maka dalam Karya Ilmiah ini masalah yang dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Provinsi DKI Jakarta dilihat dari Rasio Desentralisasi fiskal dan rasio Kemandirian Daerah Periode 2006 sampai 2010?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dan manfaat penulisan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Bagaimana Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi fiskal dan Rasio Derajat Kemandirian Daerah Periode 2006 sampai 2010

b. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dan daya pikir penulis dalam menganalisa masalah-masalah yang menyangkut laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta meningkatkan kemahiran dalam penulisan Karya Ilmiah.

2. Bagi Pemda DKI Jakarta

Untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan di kota Jakarta.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para peneliti dalam bidang akuntansi, khususnya yang berhubungan dengan laporan keuangan Pemerinta Provinsi DKI Jakarta.